

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BITUNG

Syadzali Hadji Ali, Daisy S.M. Engka, Wensy F.I Rompas
¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : syadzalihadjiali@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Bitung sebagai kota pelabuhan yang memiliki daya Tarik Wisata, perlu menggalakan program pariwisata sehingga wisatawan tidak hanya turun di Pelabuhan Bitung untuk kemudian menuju daerah lain tetapi juga berujung ke objek wisata yang ada di Kota Bitung.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Jumlah Wisatawan, PDRB, dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel di kota bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Wisatawan, PDRB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung. Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kotel di Kota Bitung.

Kata Kunci : Jumlah Wisatawan, PDRB, Inflasi dan Pajak Hotel

ABSTRACT

Regional autonomy provides broader authority for regional governments to regulate and manage the source of local revenue maximally, bitung as a port city that has tourist attraction, it is necessary to promote tourism programs so that tourist do not just go down in the port of bitung to then go to others regions, but also visited tourist attraction in the city of bitung.

The purpose of this study is to analyze the effect of the number of tourist, PDRB and Inflation on the tax revenue of the city of bitung, the analysis technique used is multiple regression analysis. The result of the study show that the number of tourist, PDRB has a significant effect on the acceptance of the hotel in the city of bitung. While inflation has no significant effect on hotel tax revenue in the city of bitung

Keyword : The number of tourist, PDRB, Inflation and hotel tax

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229). Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Bitung sebagai kota pelabuhan yang memiliki daya tarik wisata, perlu menggalakkan program pariwisata sehingga wisatawan tidak hanya turun di Pelabuhan Bitung untuk kemudian menuju daerah lain tetapi juga berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kota Bitung.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012). Salah satu penerimaan pajak daerah adalah melalui pajak daerah khususnya pajak hotel yang ada di Kota Bitung perkembangan pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Bitung setiap tahunnya mengalami kenaikan yang semakin baik.

Mengingat Bitung sebagai kota pelabuhan yang memiliki daya tarik wisata, perlu adanya penggalakan program pariwisata sehingga wisatawan tidak hanya turun di Pelabuhan Bitung. Program pengembangan kepariwisataan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun terakhir makin maju dan berkembang. Dengan program pemerintah yang digalakkan, salah satunya Festival Selat Lembeh yang diadakan setiap tahun diharapkan wisatawan tidak hanya turun di Pelabuhan Bitung untuk kemudian menuju daerah lain tetapi juga berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kota Bitung.

Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bitung baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara diharapkan mampu untuk menyumbangkan pendapatan daerah melalui pajak daerah khususnya pajak hotel yang ada di Kota Bitung. Berbagai program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi daerah dibidang pariwisata yang semakin hari semakin memberikan kontribusi yang baik untuk pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola pemerintah Kota Bitung yang menjadi objek penelitian adalah pajak hotel. Pemerintah daerah Kota Bitung sangat serius memikirkan masalah-masalah yang erat hubungannya dengan penerimaan pajak hotel dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan pajak daerah. Selain variabel jumlah wisatawan dan PDRB inflasi juga sangat berpengaruh untuk penerimaan pajak hotel.

Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunya nilai mata uang, yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta

mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengelola hotel akan menurun, sehingga penerimaan pajak hotel juga akan menurun.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang.

Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Maka dari itu ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011:1).

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Sistem Pengumutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pembagian Pajak

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga (Suandy, 2011:35) yaitu

1. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :
 - a. Pajak Pusat/Negara
Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis-jenis Pajak

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut *variable* tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari *variable* tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut *variable* bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Hotel

X₁ = Jumlah Wisatawan

X₂ = PDRB

X₃ = Inflasi

α = Konstanta/ Intercept

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia, tempat penelitian ini adalah di Kota Bitung tahun 2004 – 2015, adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data, data sekunder : badan pusat statistic (BPS) dan publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang diterbitkan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi dan lain lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linier berganda.

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bitung 2004- 2015.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). Dalam uji multikolinieritas dengan menggunakan metode VIF. Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	VIF
X1	58157759	1.336353
X2	516.8626	1.084551
X3	3.16E+14	1.328126

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari perhitungan VIF di atas, nilai yang di dapat lebih lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *White test*.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.103021$
Chi-square hitung Obs*R-squared = 1.236247
Chi-squares pada α 5 % = 7.81472

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.103021 Nilai Chi-squares hitung sebesar 1.236247 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 3 adalah 7.81473. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi menggunakan metode *LM test*. Hasil uji autokorelasi dengan metode *LM test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.125723$
Chi-square hitung Obs*R-squared = 1.508671
Chi-squares pada α 5 % = 5.99

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.125723 Nilai Chi-squares hitung sebesar 1.508671 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 2 adalah 5.99. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 4.11 berikut:

$$\text{LogY} = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + E_1$$

$$\text{LogY} = -13139.02x_1 + 182.1320x_2 + 11770703x_3$$

Tabel 4.11
Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
X1	-13139.02	-1.722897	0.1232
X2	182.1320	8.011222	0.0000
X3	11770703	0.662301	0.5264
C	2.18E+08	1.111038	0.2988
$R^2 = 0.906857$		F-statistik = 25.96322	

Keterangan ***) signifikan pada $\alpha = 1\%$
 **) signifikan pada $\alpha = 5\%$
 *) signifikan pada $\alpha = 10\%$

Hasil Olah Eviews 8.0

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Jumlah wisatawan (X1) pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel jumlah wisatawan (X1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.1232. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel jumlah wisatawan (X1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.722897 dan t_{tabel} 1.41492 dengan $df 7$ ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 1.722897 > t_{tabel} 1.41492$ Artinya ada hubungan linier antara jumlah wisatawan dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi, dapat disimpulkan jumlah wisatawan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Hasil persamaan regresi PDRB (X2) pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X2) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 1\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel PDRB (X2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 8.011222 dan t_{tabel} 2.9979 dengan $df 7$ ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 8.011222 > t_{tabel} 2.9979$ Artinya ada hubungan linier antara PDRB dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi, dapat disimpulkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Hasil persamaan regresi Inflasi (X3) pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel inflasi (X3) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.5264. Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel inflasi (X3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.111038 dan t_{tabel} 1.41492 dengan $df 7$ ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 1.111038 < t_{tabel} 1.41492$ Artinya tidak ada hubungan linier antara inflasi dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi, dapat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.4 dapat dijelaskan pengaruh variabel Jumlah wisatawan (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Y). Nilai F-statistik yang diperoleh 25.96322 sedangkan F-tabel 4.07. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/4-1) = 3$ dan df untuk denominator $(n-k/12-4) = 8$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Jumlah wisatawan (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Y).

Uji Determinasi R²

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.906857. artinya, variasi perubahan jumlah wisatawan, PDRB dan inflasi mempengaruhi penerimaan pajak hotel sebesar 90.68%, sedangkan sisanya (9,32%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

Jumlah wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian didapat bahwa jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel akan tetapi signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara jumlah wisatawan dengan penerimaan pajak hotel. Variabel jumlah wisatawan (X1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.722897 dan t_{tabel} 1.41492 dengan df 7 ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 1.722897 > t_{tabel} 1.41492$ Artinya ada hubungan linier antara jumlah wisatawan dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi, dapat disimpulkan jumlah wisatawan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian didapat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan pajak hotel artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah meningkat *ceteris paribus*. Variabel PDRB (X2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 8.011222 dan t_{tabel} 2.9979 dengan df 7 ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 8.011222 > t_{tabel} 2.9979$ Artinya ada hubungan linier antara PDRB dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi, dapat disimpulkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel inflasi (X3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.111038 dan t_{tabel} 1.41492 dengan df 7 ($n-k-1=12-4-1=7$). Jadi, $t_{hitung} 1.111038 < t_{tabel} 1.41492$ Artinya tidak ada hubungan linier antara inflasi dengan penerimaan pajak hotel (Y). Jadi Laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung dikarenakan Inflasi akan menimbulkan efek –efek buruk seperti, Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang –orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga –harga maka inflasi akan menurunkan upah riil dari orang – orang yang berpendapatan tetap sehingga orang akan lebih cenderung melakukan saving pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno,2012)

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel tetapi Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, 2011 Edisi 5.** Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Handoko, T. Hani. 2012.** Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2008.** Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011.** Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Sukirno, Sadono, 1985,** Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan, LPFE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000.** Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.